

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Good Corporate Governance menurut Tunggal (2012:24) merupakan suatu sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. *Forum for Corporate Governance in Indonesia/FCGI* (2001) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain didefinisikan dengan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Untuk dapat mengendalikan dan mengarahkan perusahaan dengan baik diperlukan penerapan tentang tata kelola perusahaan yang baik.

Di Indonesia penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) telah banyak diterapkan pada perusahaan-perusahaan terutama pada perusahaan terbuka. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan transparansi pada perusahaan terbuka sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pada semua pemangku kepentingan yang akan berinvestasi pada perusahaan. Pada peringkat *ASEAN Corporate Governance Scorecard* Indonesia tahun 2015 berhasil memperoleh skor emiten sebanyak 62,88, sedangkan tahun 2017 memperoleh skor sebesar 70,59. Peningkatan skor ini terjadi karena adanya beberapa perusahaan terbuka Indonesia yang masuk dalam nominasi *ASEAN Corporate Governance Scorecard*. Peningkatan ini menyimpulkan bahwa perusahaan terbuka di Indonesia sudah melakukan perbaikan pada kualitas Tata Kelola Perusahaannya. Usaha-usaha untuk memperbaiki *corporate governance* juga telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Komite Nasional mengenai Kebijakan *Corporate Governance* (KNKGC) adalah komite yang memantau perbaikan dibidang *corporate governance* di Indonesia. Komite tersebut menyusun

pedoman yang menghasilkan pedoman *GCG* yang dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan *corporate governance*.

GCG perlu dilakukan untuk menilai dan mengukur praktik-praktik penerapan *GCG* pada perusahaan terbuka di Indonesia. Dalam penerapan pedoman ini dibutuhkan indikator atau alat ukur (*scorecard*) untuk menilai kualitas praktik *GCG*. Salah satu indikator *CG scorecard* yang digunakan di negara ASEAN adalah ASEAN *CG Scorecard* (*ACGS*). *ACGS* tersebut dibuat berdasarkan prinsip *Organization for Economic Co-operation Development* (*OECD*) yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan-perusahaan ASEAN. Prinsip-Prinsip *GCG* yang dikembangkan oleh *OECD* meliputi beberapa hal berikut, *OECD principal of corporate governance* (2004) :

1. Hak-hak pemegang saham (*Rights of Shareholders*)
2. Perlakuan yang setara terhadap pemegang saham (*Equitable Treatment of Shareholders*)
3. Perananan Shareholders (*Role of Stakeholders*)
4. Pengungkapan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*)
5. Tanggung jawab dewan komisaris (*Responsibility of Boards*)

Prinsip-prinsip pada pedoman *OECD* menjadi tolak ukur untuk dapat menilai penerapan tata kelola terhadap perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *ACGS* lebih baik tata kelola perusahaannya dari pada perusahaan yang belum menerapkan. Perusahaan yang menerapkan *ACGS* mempunyai kecenderungan untuk terjadinya tindak kecurangan lebih rendah, hasil penelitian Aprilia menunjukkan nilai mean *FFR score* nya memiliki nilai $>-2,2$ yaitu $>-2,6$ yang menandakan bahwa perusahaan tersebut kemungkinan akan terjadi kecurangan pelaporan keuangan. Dari hasil penelitian Aprilia perusahaan yang menerapkan *ACGS* masih mungkin terjadi tindak kecurangan pada perusahaannya. Tetapi hal ini tidak menyimpulkan bahwa perusahaan yang belum menerapkan menjadi tidak baik pengelolaannya hanya saja perusahaan yang menerapkan kualifikasinya telah setingkat lebih baik tata kelolanya karena telah memiliki tolak ukur *ACGS*.

Kecurangan merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dimiliki seseorang untuk melakukan penyalahgunaan aset atau sumber daya yang dimiliki perusahaan, menurut *Association Certified Fraud Examiners* (2016:5). Hal ini dapat memicu kondisi manajemen untuk melakukan tindakan *fraud* dan dapat menimbulkan konflik teori keagenan, manajemen bertindak sebagai agen, penggunaan laporan keuangan bertindak sebagai principal Jensen dan Mackling (1976). *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016) menyatakan bahwa kecurangan merupakan tindakan penipuan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa penipuan atau kecurangan tersebut dapat menimbulkan resiko manfaat yang tidak baik bagi individu maupun perusahaan. Kasus *fraud* yang terbaru terjadi pada perusahaan *finance* Mei 2018, (Ringkang, 2018) Kasus SNP Finance & Upaya dalam Menutupi Celah tindakan Curang Keuangan. PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*) disorot oleh pihak otoritas jasa keuangan dan publik. Perusahaan pembiayaan ini ternyata berada pada posisi kepailitan. Perusahaan pembiayaan yang berada di bawah pengendalian Columbia Group tersebut pada laporan keuangannya terlihat dalam kondisi tidak terjadi masalah. Rating utang perseroan sempat mendapatkan rating stabil dari Pefindo pada Maret 2018. Namun, kondisi perusahaan berubah, rating utang perseroan berubah drastis dari stabil menjadi idSD (*selective default*) pada 9 Mei 2018 hal ini disebabkan karena salah satu kupon *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan SNP mengalami gagal bayar. Imbasnya adalah pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha SNP karena perseroan gagal membayar kupon MTN senilai Rp 6,75 miliar pada 14 Mei 2018. Diduga pihak SNP Finance tidak menyampaikan laporan keuangan dengan benar alias fiktif, sehingga yang terjadi adalah perusahaan pemeringkat dan auditor tidak mengeluarkan peringatan sebelum gagal bayar terjadi. Persoalan laporan keuangan ini sangat vital dan seringkali menjadi permasalahan bagi sebuah perusahaan bila tidak dikelola dengan baik dan benar. Berdasarkan kasus diatas, persoalan kecurangan pelaporan keuangan dapat terjadi pada perusahaan manapun.

Dampak dari kecurangan laporan keuangan dapat diminimalisasi dengan pencegahan agar tidak sampai terjadi kecurangan pada laporan keuangan yang dapat merugikan beberapa pihak yang berada pada lingkup tersebut. Pencegahan dan pendeteksian dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui *fraud triangel*, dan *fraud diamond*. Donald R Cressy tahun 1953 mengemukakan bahwa teori *fraud triangel* menjelaskan mengenai kecurangan. *Fraud triangel* menjelaskan ketiga elemen yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan.

Teori tersebut meliputi tekanan, peluang, rasionalisasi. Tekanan adalah adanya motivasi untuk melakukan dan menyembunyikan tindakan *fraud*. Peluang adalah kondisi dimana terciptanya suatu kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan. Rasionalisasi adalah suatu sikap pembenaran terhadap tindakan *fraud* yang telah dilakukan. *Fraud* dilakukan berdasarkan rasionalisasi seseorang artinya bahwa perbuatan tersebut bukan suatu pelanggaran.

Teori tentang kecurangan terus berkembang, pada tahun 2004 Wolfe dan Hermanson mengembangkan lagi konsep *fraud triangle* menjadi konsep *fraud diamond*. Konsep *fraud diamond* menambahkan *capability* sebagai salah satu konsep selain tekanan, peluang rasionalisasi. *Capability* yaitu keahlian manajemen untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengamati kondisi sosial untuk memenuhi kepentingan pribadinya (Crowe, 2011). Sehingga *fraud diamond* meliputi tekanan, peluang, rasionalisasi dan *capability*.

Hasil penelitian terdahulu telah membuktikan empat faktor tersebut memiliki pengaruh dalam mengidentifikasi kecurangan laporan keuangan. Tekanan dapat diartikan menjadi keadaan atau suatu kondisi yang membuat seseorang merasa dirinya tertekan atau ditekan, keadaan yang berat saat seseorang berada dalam kesulitan yang sedang dihadapi. Kedua arti tersebut menyatakan bahwa tekanan dapat menimbulkan seseorang untuk berbuat suatu tindak kecurangan. Menurut *Statement of Auditing Standard (SAS) no. 99*, ada beberapa jenis kondisi yang sangat umum yang dapat menimbulkan tekanan dalam tindak kecurangan laporan keuangan. Kondisi tersebut yaitu *financial stability*. SAS No. 99 menyatakan *financial stability* adalah keadaan dimana kondisi keuangan

perusahaan berada pada kondisi stabil, kondisi keuangan perusahaan dikatakan stabil apabila perusahaan dapat mencukupi beberapa kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang sedang berjalan saat ini atau rutin saat ini, dan maupun kebutuhan yang sifatnya mendesak. Berdasarkan hasil penelitian Tessa dan Puji (2016) dan Aprilia (2017) konstruk dari tekanan adalah *financial stability*. Penelitian tersebut membuktikan bahwa *financial stability* berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan Oktarigusta (2017), Sihombing & Rahardjo (2014), Rahmayuni (2018), Wahyuni dan Budiwitjaksono (2017) dan Mekarsari (2018) bahwa *financial stability* tidak memiliki pengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Peluang merupakan situasi yang memungkinkan terciptanya suatu tindak kecurangan. Peluang dapat terjadi karena lemahnya pengawwasan internal pada perusahaan sehingga menciptakan kondisi atau celah untuk seorang dapat melakukan tindak kecurangan. Menurut hasil penelitian Wahyuni dan Budiwitjaksono (2017) konstruk dari peluang adalah ketidakefektifan pengawasan (*ineffective monitoring*). Akibat dari ketidakefektifan pengawasan menyebabkan lemahnya kontrol internal terhadap perusahaan, sehingga dapat menimbulkan peluang tersendiri bagi beberapa pihak untuk melakukan tindakan kecurangan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketidakefektifan pengawasan tidak berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian Budiwitjaksono (2017) juga didukung oleh penelitian Mekarsari (2018) dan penelitian Tessa dan Puji (2016). Namun hasil ini tidak didukung oleh Oktarigusta (2017) yang membuktikan bahwa ketidakefektifan pengawasan berpengaruh negatif terhadap adanya kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Ini berarti bahwa pengawasan yang tidak efektif akan meningkatkan kemungkinan kecurangan laporan keuangan naik dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan jumlah komisaris independen berpengaruh dalam pengawasan pada kinerja manajemen.

Rasionalisasi menunjukkan ketegangan hubungan antara auditor sekarang atau terdahulu dengan manajemen sehingga menunjukkan adanya indikasi tindak kecurangan laporan keuangan dalam (Pernyataan Standar Auditor (PSA) No.70).

Hasil penelitian Wahyuni dan Budiwitjacksono (2018) dan Rahmayuni (2018) membuktikan bahwa rasionalisasi, dengan kontrak pergantian auditor berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang sering melakukan pergantian auditor mengindikasikan adanya kecurangan pelaporan keuangan. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Aprilia (2017) Aprilia (2017) menunjukkan bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Capability yaitu seberapa besar kemampuan seseorang dalam melakukan tindak kecurangan dilingkungan perusahaannya. Dalam penelitian Sihombing & Rahardjo (2014) konstruk *capability* adalah pergantian direksi. Ini berarti apabila terjadi pergantian direksi mengindikasikan bahwa perusahaan berupaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Penelitian - penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konklusif. Penelitian ini akan menggunakan model penelitian yang menggunakan variabel yang sama dengan penelitian terdahulu. Terutama pada penggunaan variabel yang mengukur masing-masing elemen *fraud diamond*. Tekanan diukur dengan konstruk *financial stability*, *financial stability* di proksikan dengan perubahan rasio total aset. Peluang diukur dengan konstruk ketidakefektifan pengawasan, ketidakefektifan pengawasan diproksikan dengan frekuensi rapat komite audit. Rasionalisasi diukur dengan konstruk pergantian auditor. *Capability* diukur dengan konstruk pergantian direksi. Penelitian ini menggunakan objek pada perusahaan yang belum dan telah menerapkan ACGS. Objek penelitian ini dikembangkan dari penelitian Aprilia (2017) telah melakukan pengujian terhadap pengaruh *fraud pentagon* dalam mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan yang menerapkan ACGS. Penelitian ini akan menggunakan perusahaan yang telah dan belum menerapkan ACGS. Penelitian ini akan menguji perbedaan tingkat kecurangan laporan keuangan pada perusahaan yang telah dan belum menerapkan ACGS.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah ini, rumusan masalah utama penelitian ini adalah: Apakah terdapat peranan *fraud diamond* dalam mengidentifikasi kecurangan pelaporan keuangan. Rumusan masalah utama di atas dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apakah terjadi perbedaan tingkat kecurangan laporan keuangan pada perusahaan yang telah dan belum menerapkan ACGS ?

Selain menguji peranan *fraud diamond* untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan, penelitian ini juga menguji konstruk dari *fraud diamond* , yaitu:

2. Apakah *financial stability* berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan ?
3. Apakah ketidakefektifan pengawasan berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan ?
4. Apakah pergantian auditor berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan ?
5. Apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan ?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Peranan ACGS dalam mengurangi tingkat kecurangan laporan keuangan pada perusahaan.
2. Peranan *fraud diamond* dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat akademik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian - penelitian berikutnya mengenai peranan *fraud diamond* dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan yang menerapkan dan belum menerapkan ACGS.

b. Manfaat praktis : Hasil penelitian diharapkan bagi :

1. Investor & kreditor:

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh investor dan kreditor sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai investasi pada sebuah perusahaan, khususnya peranan ACGS dan *fraud diamond* untuk mendeteksi tingkat kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan.

2. Manajemen:

Dapat digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki lagi kinerja manajemen dalam mengelola pengendalian internal pada perusahaannya. Sehingga perusahaan terhindar dari berbagai masalah indikasi *fraud*.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara keseluruhan yang terdiri atas lima bab. Uraian ide pokok yang terkandung pada masing-masing bab adalah:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, dan metode penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari desain penelitian, definisi dan operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas gambaran umum dan objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB 5 : SARAN, SIMPULAN DAN KETERBATASAN

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran penelitian yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.